

Kebijakan Sistem Zonasi Persekolahan Untuk Pemerataan Dan Mutu Pendidikan: Universalisasi Vs Seleksi, Melawan Arus?

Suyata Suyata^{1,*}

¹ Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

^{1*}suyata@mp.uad.ac.id

Received: December 29, 2024

Revised: December 31, 2024

Accepted: December 31, 2024

KATA KUNCI

ekuiti,
kesenjangan pendidikan,
sistem zonasi,
sistem orang tua memilih

ABSTRAK

Artikel ini membahas dua sistem penempatan siswa di sekolah dan kelas berfokus dampaknya terhadap perbaikan sekolah dan belajar semua anak. Negara berusaha mengendalikan pendidikan melalui sekolah negeri, publik. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini ada studi pustaka. Pemerintah menetapkan zona-zona pendidikan sebagai suatu sistem dikenal juga sistem neighborhood schooling. Berbagai sebab dan pertimbangan kebijakan orang tua memilih sekolah ditetapkan dan menjadi luas sekitar tahun 80an akhir. Orang tua bebas memilih sekolah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka. Timbullah fenomena sekolah favorit dan nonfavorit. Kesenjangan pendidikan mulai dibahas terkait dengan orang tua memilih. Pemerintah mengeluarkan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Timbullah pro dan kontra sistem zonasi pendidikan. Dua sistem generic penempatan siswa di sekolah dan kelas itu sarat ideology. Kelompok orang tua memilih sekolah memiliki kaitan dengan pandangan bahwa pendidikan itu suatu komoditas dapat dijualbelikan secara bebas. Praktik selektif mendominasi pendidikan. Dampaknya terjadinya pemisahan etnis dan social di sekolah dan di masyarakat. Ini berbeda dengan pandangan bahwa pendidikan itu "barang social" untuk semua orang dan perbaikan pendidikan dapat diusahakan bersama oleh seluruh masyarakat dengan prinsip ekuiti berdimensi fairness dan inklusi. Perlu dikembangkan institusi yang dapat membebaskan prestasi siswa lepas dari kondisi social ekonomi orang tua dan setiap siswa dapat memiliki keterampilan dasar minimal untuk perbaikan kehidupan mereka dan masyarakatnya. Lazimnya pemerintah pusat dan daerah menetapkan zona-zona sekolah dan mengatur penempatan siswa. Zona pendidikan dan prosedur penempatan anak dapat terus dikaji dampaknya buat perbaikan. Konsep indeks dissimilarity dan indeks exposure dikembangkan untuk memantau dampak implementasi dua sistem penempatan siswa tersebut.

KEYWORDS
educational disparity,
equity,
parental choice system,
Zoning system

School Zoning System Policy for Equity and Quality of Education: Universalization vs. Selection, Going Against the Current?

This article discusses two systems of student placement in schools and classes, focusing on their impact on school improvement and learning for all children. The research uses librarian research. The state attempts to control education through public schools. The government establishes

educational zones as a system also known as the neighborhood schooling system. Various reasons and considerations for parents' policies in choosing schools were established and became widespread around the late 80s. Parents have been free to choose schools since Indonesia's independence. The phenomenon of favorite and non-favorite schools arose. The educational gap began to be discussed concerning parents' choices. The government issued a zoning policy for accepting new students (PPDB). The pros and cons of the education zoning system arose. The two generic systems of student placement in schools and classes are complete with ideology. The group of parents choosing schools is related to the view that education is a commodity that can be freely traded. Selective practices dominate education. The impact is the occurrence of ethnic and social separation in schools and society. This is different from the view that education is a "social good" for everyone and that educational improvement can be worked on together by the entire community with the principle of equity with dimensions of fairness and inclusion. It is necessary to develop institutions to free students' achievements from their parents' socio-economic conditions and give each student basic skills to improve their lives and communities. Usually, the central and regional governments determine school zones and regulate student placement. The impact of educational zones and child placement procedures can be continuously assessed for improvement. The dissimilarity and exposure index concepts were developed to monitor the effects of implementing the two student placement systems.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Pendahuluan

Artikel ini membahas sistem penempatan siswa di sekolah menengah atas negeri (SMAN) terutama tingkat pendidikan ini belum memasuki wajib belajar. Anak-anak tamat Sekolah menengah pertama dan sederajat (SMP) tidak wajib masuk sekolah. Oleh karena itu proses seleksi dapat dibenarkan bilamana sekolah menghendaki, Penempatan anak di SMA menggunakan dua sistem yaitu sistem orang tua berhak/ boleh memilih sekolah dan sistem zonasi, orang tua memasukkan anaknya ke SMA di zona kediamannya dengan status kependudukan resmi.

Sebelum negara nasional lahir pendidikan persekolahan menjadi milik swasta. Negara nasional mengambil operasi hak pendidikan dan timbullah konflik Negara dan swasta. Sistem persekolahan telah berkembang di Eropa dengan sistem sekolah negeri (state) atau publik (public) Amerika didirikan mendekati permukiman (neighborhood schooling). Untuk waktu yang panjang sekolah-sekolah berlangsung dalam sistem kebijakan sejalan dengan pola residensi penduduk.

Perkembangan seterusnya kelompok orang mampu manakala kondisi sekolah negeri/ public tak sejalan dengan kebutuhan dan keinginan, mereka maka mereka akan memilih memasukkan anak-anak mereka ke sekolah swasta Kelompok orang mampu (the have) memiliki banyak pilihan buat sekolah anak-anak mereka; sementara itu kelompok kurang

mampu (the have not) menghadapi pilihan sekolah terbatas. Terjadinya segregasi hunian membawa akibat juga segregasi persekolahan.

Pengaruh neo liberalisme membawa pikiran ekonomi ini ke ranah pendidikan dengan memperkenalkan kebebasan memilih sekolah dengan gagasan open enrollment (telaah Poder, Lauri & Viski¹ tentang kasus Swedia 2016) ke sekolah dikenal juga dengan parent choice and school choice (Burgess et al.³ 2015. Tahun akhir 80an gerakan school dan parent choice di England, Amerika Serikat, New Zealand, misal³. Mereka meyakini bahwa parent choice akan mendorong sekolah-sekolah berkompetisi mengusahakan perbaikan mutu para siswa berkompetisi belajar mencapai prestasi tinggi.

Banyak penelitian dampak parent choice ini yang memberikan bukti-bukti kesalahan klaim tersebut. Hasil-hasil siswa di sekolah masih menemukan kuatnya kontribusi latar belakang keluarga Zealand 29% di England dan 8% di Perancis (Poder, Lauri & Veski, 2016)⁴ Di beberapa kasus negara dampak latar belakang keluarga dapat dieliminir, misal Finlandia Sahlberg dalam Walker, 2017)⁷. Fenomena seperti ini yang menimbulkan keyakinan sekolah dapat diperbaiki untuk semua anak dengan prinsip kombinasi quality dan equity (Poder, Lauri & Veski, 2016,⁸ OECD, 2012⁹

Arus perbaikan sekolah dewaa ini sedang ramai-ramai meninggalkan zonasi mengibarkan bendera open enrollment, free choice of school plus kompetisi. Pada hal hasil-hasil penelitian memberikan sinyal pentingnya kebijakan zonasi dengan modifikasinya. Dua sistem alokasi siswa itu sama-sama menuju sekolah-sekolah berkinerja tinggi (high performing school) dan meningkatkan sekolah berkinerja rendah (low performing school).

Seperti telah disinggung di depan sistem alokasi siswa ke sekolah dan ke kelas berbasis orang tua bebas memilih berbarengan dengan pemisahan sekolah unggul dan sekolah tak unggul, pemisahan kelompok orang mampu, beruntung dan kelompok orang tak mampu dan tak beruntung. Dua kelompok orang tersebut memiliki permukiman yang berbeda dan terpisah. Kemanakah sistem zonasi kita menuju? Mampukah zonasi mempertahankan sekolah berkinerja tinggi bahkan terus memperbaikinya lagi? Mampukah kita mengusahakan agar sekolah-sekolah kita menghadirkan dampak mengungguli dampak factor keluarga?

Jalan itu panjang kadang tak menentu banyak tikungan dan tanjakan, tingkat perkembangan sekolah-sekolah bervariasi. Ini menjadi tantangan kebijakan zonasi Pendidikan kita. Pendidikan bermutu tinggi memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka diupayakan dapat dinikmati oleh semakin banyak warga negara kita

Metode

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan menggunakan beberapa rujukan yang membahas mengenai sistem zonasi baik berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu artikel yang berhubungan dengan pembahasan zonasi sekolah juga diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Kebebasan dan Demokratisasi

Era penjajahan Belanda pendidikan di Indonesia bercorak rasial dan kelas social. Masing-masing ras mengembangkan sistem persekolahan sendiri; ada sekolah Eropa, sekolah Arab sekolah Cina, dan sekolah pribumi. Yang terakhir hanya untuk kelompok kecil kaum pribumi, hanya orang kuat dalam arti ekonomi dapat bersekolah. Kondisi demikian itu mendorong lahirnya keinginan persekolahan yang memiliki sifat pembebasan dan demokratis.

Penjabarannya swasta berhak mendirikan sekolah dan tiap warga negara memiliki hak mendapatkan pengajaran dengan prinsip siapa mau dan mampu.

Tes masuk sekolah, sistem kenaikan kelas, ujian masuk ke sekolah lebih tinggi digunakan untuk melihat kemampuan. Kompetisi menjadi alat yang diyakini dapat menggerakkan belajar anak-anak

Sejalan dengan itu semua jenjang sekolah dan daerah tampil menjadi sekolah favorit berada di papan atas tiap tahun baru pelajaran diserbu orang tua. Berkembanglah sekolah-sekolah favorit termasuk SMAN favorit, diminati banyak pelamar. Sekolah kelompok atas makin diminati dan datang dari banyak daerah. Sementara sekolah papan bawah tak diminati dan berpeluang menjadi sekolah gagal (*failed schools*).

Tahun 90an ketika Depdikbud menetapkan kebijakan wawasan keunggulan, implementasi yang cepat diperkenalkan adalah menunjuk sekolah-sekolah unggulan untuk setiap propinsi dan untuk setiap kabupaten. SMAN yang telah dikenal sebagai SMAN favorit ditetapkan sebagai SMA model atau juga dikenal dengan SMA rujukan. Model sekolah model disiapkan dan diam-diam melegalkan segregasi sekolah.

Dengan latar belakang tersebut kebijakan zonasi yang telah diterapkan mendapat tanggapan pro dan kontra dan ini sangat wajar. Orang tua kelompok beruntung dan sekolah-sekolah yang dapat memilih siswa merasa dirugikan dengan kebijakan zonasi. Beberapa kasus sekolah unggulan, SMA, merasa zonasi telah mengganggu profil sekolah mereka yang biasanya memiliki peluang menentukan siswa yang dapat diterima tiap tahun ajaran baru.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Juknis PPDB nomor 0885/PERKA/2019 tgl 7 Mei 2019 dan diperbaharui dengan

surat keputusan nomr 1070/PERKA/2019 tgl. 10 Juni 2019; zonasi diberikan ketentuan sebagai berikut,

“Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/ area menjadi beberapa bagian dalam penyeleggaraan PPDB untuk pemerataan kualitas pendidikan” Tiap SMAN memiliki wilayah tangkapan (intake/ catchment zone. Dua lapis zona 1 dan zona dua. Tiap SMAN sesuai dengan kapasitas daya tampung dapat mengalokasikan minimal 90% Siswa dari zonanya, 5% prestasi dan 5% pindahan karena tugas orang tua ke wilayah Yogyakarta.¹⁰

Kondisi setiap SMA bervariasi internal dan eksternal konteksnya peniadaan sekolah unggulan oleh proses intake siswa dan sekolah non unggulan oleh proses yang sama tidak akan otomatis menjadi kondisi pemerataan mutu. Banyak hal harus dikerjakan; baik oleh sistem organisasi penunjang pusat dan daerah maupun sekolah dengan bermitra secara kooperatif kolaboratif untuk perbaikan sekolah.

Kritik terhadap kebijakan orang tua dan sekolah memilih perlu dijadikan bahan pemikiran dan refleksi agar lebih cerdas dan bijak menata persekolahan ke depan

2. Aneka Pandangan Dan Kritik Sistem Memilih Sekolah

Di banyak negara peniadaan zonasi diperdebatkan seperti halnya penetapan orang tua dan sekolah memilih Arus globalisasi dan liberalisasi telah menjadi daya dorong kuat pergeseran dari zonasi ke non zonasi. Kajian Beaven (2003)¹¹ di New Zealand mencermati dampak The Picot Report dan Tomorrow's School Reform penghapusan zonasi dan memperkenalkan mekanisme pasar dalam pendidikan, orang tua memilih sekolah. Kemampuan orang tua memilih sekolah bervariasi terjadi perbedaan antara kelompok orang tua beruntung dan kelompok orang tua tak beruntung. Siapakah yang memperoleh manfaat hapusnya zonasi? Kelompok orang tua yang beruntung memperoleh manfaat banyak memiliki rentangan luas pilihan dan tak dimiliki oleh orang tua yang tak beruntung.

Beaaven merujuk pendapat Collins (1993) tentang konsep memilih sebagai kesempatan memilih dalam rentangan pilihan potensial yang tersedia. Dalam konteks ini perbedaan posisi sosial ekonomi orang tua berhubungan dengan luasnya rentangan opsi yang diungguli kelompok mampu.

Memilih sekolah di Inggris dimaknai sebagai hak preferensi terhadap sekolah tertentu dan preferensi orang tua yang paling tinggi dihormati sesuai dengan mekanisme pengalokasian yang ditetapkan.¹² Tiap orang tua dapat memilih 3 sd 6 sekolah dengan menyertakan keterangan tentang pilihan tersebut dan dapat di dalam zona maupun lintas zona. Umumnya orang memilih sekolah dengan catatan akademik yang baik, komposisi teman sebaya, adanya saudara kandung di sekolah, dan kedekatan dengan rumah.¹³

Sistem lama dengan orang tua memilih dan sekolah memilih yang terjadi di Indonesia mengingatkan adanya polarisasi pemilihan sekolah: sekolah-sekolah pilihan (favorit) dan sekolah-sekolah tanpa memilih. Hal demikian terjadi terus menerus seolah-olah posisi sekolah-sekolah semakin membentuk kasta akademik. Jarang sekali kehadiran sekolah negeri baru (SMAN) mampu menggeser hierarkhi sekolah yang telah ada,

Kompetisi seperti terjadi di dunia bisnis dipakai untuk memperbaiki mutu sekolah dan mutu hasil belajar para siswa. Sekolah diharapkan berlomba-lomba meningkatkan mutu pendidikan dengan prinsip melakukan kompetisi dengan sesama sekolah yang lain. Ruang sekolah dan ruang-ruang kelas menerapkan sistem kompetisi. Praktik pemeringkatan indeks prestasi belajar baik di dalam kelas maupun lintas rombongan belajar di kelas yang sama dilakukan secara rutin dalam buku rapor siswa.. Anehnya juga sistem ini didukung oleh media dan orang tua siswa dan masyarakat luas.

Di banyak negara, misal di Inggris dan di Amerika Serikat kebijakan akuntabilitas sekolah ditetapkan dengan mempublikasikan hasil-hasil ujian sekolah Sekolah-sekolah yang gagal menunjukkan hasil yang baik akan dipenalti saat tahun ajaran baru datang. Bahkan kalau sekolah tak menunjukkan kinerja perbaikan, kepala sekolah dapat diganti dan juga para guru yang dianggap melalaikan tanggungjawab perbaikan prestasi para siswa.

Ini banyak dikritik sebagai melupakan bagaimana penelitian empirik prestasi siswa baik itu tinggi atau rendah di sekolah ternyata sumbernya bukan faktor-faktor internal sekolah, melainkan faktor anak dan orang tua mereka.

Prinsip mengembangkan semua sekolah agar kesenjangan mutu semakin mengecil terus dikaji dan dipantau dijadikan diskusi para ahli dan para praktisi.

Keberadaan sekolah-sekolah sepi pemilih mengisyaratkan potensi sekolah gagal dan ini salah satu korban kebijakan orang tua dan sekolah memilih.

Finlandia merupakan kasus menarik kendati mereka membuka lebar kebijakan memilih tetapi mereka tak sungguh-sungguh melaksanakannya. Orang tua lebih suka mengirimkan anak mereka ke tempat yang lebih dekat, tentu karena kesesuaian dengan kondisi mereka.

Pembahasan

Ke depan perlu dipikirkan hal-hal terkait dengan menempatkan lokasi sekolah tertentu dan fasilitas fisik dan nonfisik yang dibutuhkan guna memberikan pendidikan anak seutuhnya. Sejak kita mengatur sistem persekolahan dengan perangkat pengaturannya, syarat-syarat edukatif dan non edukatif pendukung perkembangannya tak sungguh-sungguh dipikirkan.

Perhatikanlah bagaimana dan seperti apa penempatan sekolah di jaman kolonial tanpa kita ingin melestarikan warisan kolonial tersebut. Untuk rakyat banyak tersedia HIS, MULO, dan AMS.

Bangunan dan arsitekturnya dipikirkan, Penataan ruang kelas, halaman, fasilitas tempat olah raga tersedia. Banyak sekolah tak memiliki halaman dan tempat olah raga siswa dan tak jarang jadual olah raga mencari tempat seadanya dan bahkan lari-lari di trotoar jalan.

Pikiran membuat sekolah tempat layak, nyaman dan aman buat siswa berada dan belajar tak diperhatikan. Jarak sekolah sejenis satu dengan yang lain tak diperhatikan yang penting ada tanah dan di situlah bangunan sekolah didirikan.

Perlu adanya pemetaan lokasi sekolah-sekolah yang ada agar sekolah secara fisik dan edukatif sosial dan kultural tertata.

Usaha perbaikan mutu perlu dirancang sungguh-sungguh dan melibatkan banyak pihak agar masyarakat menjadi peduli terhadap perbaikan mutu yang memerlukan jangka panjang dan usaha terus menerus berkesinambungan.

Pertimbangan perubahan demografik wilayah tangkapan SMA perlu dipantau sebab keberadaan sekolah tergantung pada populasi penduduk, populasi sekolah sekolah di bawah SMA

Simpulan

Pembahasan ini mengisyaratkan bahwa keberadaan sekolah-sekolah SMA di suatu wilayah gugus pengembangan SMA perlu terus dikaji. Keterlibatan ahli demografi perlu dilibatkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi untuk mendapatkan gambaran mobilitas penduduk usia sekolah di wilayah gugus SMA yang ditentukan.

Sistem akuntabilitas SMA perlu dikaji agar semua faham apa arti sistem akuntabilitas mutu SMA dan dukungan apa yang perlu diperoleh sekolah dalam proses mengembangkan perbaikan sekolah.

Di saat banyak negara melakukan perubahan dari sistem zonasi ke sistem orang tua memilih sekolah, kita justru bergerak sebaliknya dari sistem orangtua dan sekolah memilih siswa ke sistem zonasi. Di beberapa propinsi Bulan Juli bulan isu penerimaan siswa baru SMA timbul dan seringkali terjadi semacam mensiasati status kependudukan anak dan penalti diberikan kepada anak yang semula diterima di SMA tertentu dibatalkan. Perlukah tindakan pembatalan warga negara kita gara-gara sistem yang ada peluang mensiasatinya?

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Ahmad Dahlan.

Daftar Pustaka

Carrie Beaven, Parental choice or school choice: How to benefit from removal zoning? New

- Zealand Annual Review of Education, 12, 2003, 111-126,
- Kaire Ponder, Tuiin Lauri, and Andre Veski, Does school admission by zoning affect educational inequality? A study of family background effects in Estonia, Finland, and Sweden. Doi:1080/00313831.2016.1173094. Scandinavian Journal of Educational Research June 2016.
- Kaire Ponder, Tuiin Lauri, and Andre Veski, Does school admission by zoning affect educational inequality? A study of family background effects in Estonia, Finland, and Sweden. Doi:1080/00313831.2016.1173094. Scandinavian Journal of Educational Research June 2016
- OECD, Equity, and quality in education: Supporting disadvantaged students and schools, OECD Publishing, 2012.
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Nomor 0885/PERKA tgl 7 Mei 2019 dan diperbarui dengan nomor 1070//PERKA/2019 Tgl. 10 Juni 2019 Tentang Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020
- Simon Burgess, Ellen Greaves, Anna Vignoles and Deborah Wilson, "What parent want: School preference and school choice." The Economic Journal September 2015
- Timothy D, Walker, Teach like Finland: 33 simple strategies for joyful classrooms, New York, London: W. W. Norton & Company, 2017.